



MANIFESTASI NASIONALISME DIASPORA ARMENIA DAN AZERBAIJAN DALAM KONFLIK NAGORNO-KARABAKH

Rahayu A.H. Simangunsong¹, Ani W. Soetjipto²

^{1,2}Department of International Relations, Universitas Indonesia, Indonesia;
¹rahayusimangunsong07@gmail.com, ²anisoejtjpto@gmail.com

Abstract

This article aims to see how the diasporas' nationalist ideas are manifested in the homelands' conflict through a comparative case study of the Armenian and Azerbaijani diasporic nationalism in the Nagorno-Karabakh Conflict. Factors affecting the efficacy of diasporic activity from Shain & Barth (2003) is used as the conceptual framework within which the comparison is conducted. The result of this case study indicates that the manifestation of Armenian diasporic nationalism tends to be radical while Azerbaijani diasporic nationalism tends to be moderate. In conclusion, this case study finds that there are various aspects other than nationalism that influence the dynamics of diaspora activism and need deeper investigation, for example by integrating approaches that are sensitive to the experiences of marginalized groups such as feminism and postcolonialism in the diaspora studies.

Keywords: diaspora, diasporic nationalism, international relations

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana ide nasionalisme yang dimiliki diaspora terwujud dalam konflik di tanah air melalui studi kasus komparatif nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam Konflik Nagorno-Karabakh. Faktor yang mempengaruhi efektivitas aktivitas diaspora dari Shain & Barth (2003) digunakan sebagai kerangka konseptual untuk perbandingan yang dilakukan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa manifestasi nasionalisme diaspora Armenia cenderung radikal sementara nasionalisme diaspora Azerbaijan cenderung moderat. Sebagai kesimpulan, studi kasus ini menemukan bahwa ada berbagai aspek selain nasionalisme yang mempengaruhi dinamika aktivisme diaspora dan perlu diteliti lebih dalam, misalnya dengan mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman kelompok marjinal seperti feminisme dan poskolonialisme dalam pembahasan mengenai diaspora.

Kata Kunci: diaspora, hubungan internasional, nasionalisme diaspora

Pendahuluan

Diaspora secara luas diakui sebagai kontributor yang signifikan bagi pembangunan negara asalnya melalui pengiriman remitansi (Sinatti & Horst, 2015: 134-135). Klaim ini diperkuat dengan Laporan Keuangan Global Bank Dunia tahun 2003 yang menunjukkan bahwa tren investasi dari remitansi diaspora jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan pembangunan resmi (Raghuram, 2009: 104). Antusiasme terhadap potensi remitansi diaspora bagi pembangunan negara asal ini juga terlihat dari popularitas isu ini dalam tulisan akademis dalam lensa utilitarian. Selain pembahasan mengenai peranan remitansi diaspora dalam agenda ekonomi negara asal (Koinova & Tsourapas, 2018); (Østergaard-Nielsen, 2001); (Tölölyan, 1996), pembahasan mengenai diaspora dalam kerangka utilitarian juga menyoroti peran diaspora sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politis negara asal (Shain & Barth, 2003); (Koinova, 2009); (Koinova & Tsourapas, 2018); (Lie, 2001).

Tren studi diaspora dalam konteks nasionalisme yang didominasi oleh pendekatan utilitarian ini problematis karena dua hal. Pertama, pendekatan ini sangat menekankan sentralitas negara dalam melihat diaspora dan nasionalisme mereka. Pemerintah negara asal menyadari bahwa diaspora memiliki potensi dan dukungan finansial yang diperlukan untuk menyokong pembangunan di negara asal (Shain & Barth, 2003: 471), lalu pemerintah negara asal menjalin hubungan dengan diaspora untuk memperoleh hasil ekonomi dan politik (Koinova & Tsourapas, 2018: 313). Dalam pendekatan ini, aktivitas nasionalisme yang digagas oleh komunitas diaspora menjadi bermasalah ketika tidak sejalan dengan kepentingan negara asal. Dasar nasionalisme dari aktivisme mereka menjadi seolah layak dipertanyakan bila mengganggu stabilitas atau merugikan negara asalnya. Terutama aktivitas yang berkaitan dengan konflik di tanah air, peran diaspora sebagai sumber dukungan dana, senjata, dan obat-obatan bagi organisasi/kelompok yang tengah berkonflik dengan negara sering diasosiasikan sebagai aksi separatisme yang mengancam kedaulatan negara (Sulistiyono, 2011: 211-212), dan diterjemahkan sebagai tindakan yang tidak nasionalis.

Kedua, pendekatan ini kurang inklusif dalam melihat dinamika aktivisme yang dimiliki diaspora. Karakteristik dan jenis diaspora beragam dan ide mereka tentang bagaimana berkontribusi terhadap tanah air juga beragam. Namun keberagaman ini

masih kurang direpresentasikan dalam studi mengenai diaspora karena adanya dominasi pendekatan pembangunan nasional dalam melihat relasi diaspora dan tanah air. Padahal komunitas diaspora memiliki isu lain yang berkelindan dengan ide nasionalisme mereka, misalnya asimetri gender (Helmreich, 1992), fragmentasi identitas subnasional dan agama (Kurien, 2017) yang mempengaruhi aktivisme diaspora di tanah air. Salah satu contohnya adalah diaspora Indonesia yang terdiri atas beberapa diaspora subnasional, misalnya diaspora Aceh dan diaspora Maluku yang mewujudkan rasa nasionalisme mereka dengan cara yang berbeda. Diaspora Aceh di Malaysia berperan penting dalam mendukung gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan melanggengkan konflik internal selama tiga dekade di Indonesia (Missbach, 2013: 1065). Berbeda dengan diaspora Aceh, diaspora Maluku di Belanda yang terbentuk dari era penjajahan Belanda tidak memiliki nasionalisme yang mengandung tujuan politik tertentu (Gusnelly, 2017: 40), wujud nasionalisme mereka dikaitkan dengan aktivitas afektif dan nostalgia terhadap tanah air seperti musik, makanan, dan penggunaan bahasa tanah air di negara tuan rumah. Kurangnya inklusifnya pemahaman mengenai aktivisme diaspora ini menunjukkan bahwa nasionalisme diaspora masih kurang mendapat perhatian dari akademi ilmu Hubungan Internasional.

Dua permasalahan utama dalam kajian mengenai diaspora yang dikaitkan dengan nasionalisme sebelumnya menjadi suatu panggilan untuk membahas isi dengan lebih mendalam. Nasionalisme merupakan salah satu bahasan penting dalam hubungan internasional. Nasionalisme memberikan rasa kepemilikan identitas nasional yang diperlukan negara untuk menjaga eksistensinya di dunia internasional (Halliday, 2001: 443). Akan tetapi, studi ilmu Hubungan Internasional arus utama masih membatasi konteks nasionalisme pada teritori dan masyarakat yang ada di dalamnya (Lie, 2001: 359). Dalam pandangan nasionalisme konvensional yang sarat dengan asumsi *methodological nationalism* ini, diaspora sebagai aktor independen dan unit analisis yang penting dalam memahami nasionalisme masih dikesampingkan. Kehadiran konsep nasionalisme diaspora dalam hubungan internasional menjadi salah satu jalan keluar dari perangkat metodologis tersebut.

Diaspora sebagai sebuah konsep selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, diaspora Yahudi dan Armenia kuno digunakan sebagai pola

dasar untuk menentukan apa itu diasporisasi dan siapa itu diaspora. Lalu seiring dengan globalisasi dan akseleraasi migrasi internasional, konsep diaspora juga mengalami perkembangan dan mulai mencakup berbagai komunitas imigran selain Yahudi dan Armenia kuno. Diaspora, meminjam istilah Clifford (Clifford, 1994), sebagai *travelling concept* dalam debat konseptual masih akan terus mengalami konstruksi dan rekonstruksi makna. Akan tetapi, dalam tulisan ini penulis menggunakan definisi konsep diaspora dari Brubaker sebagai landasan bagi analisis berikutnya. Brubaker melihat bahwa konsep diaspora memiliki tiga karakteristik dasar yaitu dispersi, tanah air dan pemeliharaan batas (Brubaker, 2005).

Perkembangan istilah diaspora telah mendorong perkembangan studi diaspora termasuk dalam kaitannya dengan isu nasionalisme. Istilah nasionalisme diaspora merujuk pada nasionalisme jarak jauh yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Anderson dalam tulisannya yang berjudul *Long-Distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics*. Istilah nasionalisme jarak jauh dipakai oleh Anderson untuk menggambarkan partisipasi politik tanpa tanggung jawab atau akuntabilitas dari seorang imigran. Imigran tersebut bisa memberi kontribusi politik dan ekonomi terhadap gerakan kelompok/pemerintah di tanah airnya namun tidak memiliki hak suara dan kewajiban membayar pajak pada tanah airnya (Anderson, 1992: 12). Nasionalisme yang dimaksud Anderson merujuk pada nasionalisme etnis yang muncul dari pengasingan. Fenomena yang terjadi adalah, para imigran merasa mereka secara politis terpinggirkan dan secara ekonomi tersubordinasi di metropolis, alhasil kehidupan emosional dan psikologi politik mereka sering kali tetap berorientasi ke tanah air. Hal ini kemudian menimbulkan perjuangan sosial dan politik yang keras dan menghasilkan gerakan nasionalisme (Anderson, 1992: 5-8). Dalam memahami nasionalisme pada konteks diaspora, penulis mengadopsi pemikiran Smith (Smith, 1991) yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah ideologi dari bangsa, bukan negara. Diaspora dalam hal ini dimaknai sebagai bagian dari komunitas bangsa yang dibayangkan (Anderson, 1983) dengan karakter etnis yang tidak dibatasi oleh teritori tertentu.

Peningkatan perhatian pada isu mengenai nasionalisme diaspora dipicu oleh semakin dikenalnya diaspora sebagai salah satu aktor penting yang mampu menghubungkan ranah domestik dengan ranah internasional. Lebih spesifik, aktivitas

dan pengaruh diaspora di tanah air sebagai salah satu kelompok kepentingan kontemporer telah memperluas makna 'politik dalam negeri' yang umumnya dibatasi oleh teritorial negara sehingga tidak hanya bermakna sebagai politik di dalam negara tetapi juga di dalam masyarakat (Shain & Barth, 2003: 460-462). Aktivitas diaspora yang berada pada lokus yang tidak terbatas serta isu yang beragam telah menjadi tantangan yang nyata bagi hegemoni negara dalam memaknai nasionalisme.

Selanjutnya, meskipun signifikansinya mulai diakui di ranah internasional terutama dalam isu ekonomi dan pembangunan, pembahasan diaspora dalam konteks politik identitas serta konflik di tanah air masih tidak umum dan marjinal dalam diskusi dan kajian ilmiah. Padahal, isu politik identitas diaspora sangat riil dan kerap terjadi baik di level domestik maupun internasional. Pada bulan September tahun 2020, konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh kembali mengalami eskalasi (Kramer, 2020). Beberapa aktor yang terlibat dalam konflik ini diantaranya adalah Armenia dan Azerbaijan dan diaspora masing-masing negara. Diaspora Armenia yang tinggal di luar negeri berkontribusi dengan mengirim uang atau bergabung dalam konflik sebagai kombatan. Sementara itu, diaspora Azerbaijan juga aktif, mengorganisasikan demonstrasi dan mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk tentara yang terluka dan keluarganya (B. Baser & Féron, 2020). Meskipun Armenia dan Azerbaijan secara historis dikenal sebagai pusat penting dari dua agama besar, Kristen (Armenia) dan Islam (Azerbaijan), namun agama tidak menjadi penyebab konflik utama antara kedua pihak. Phillippe-Blumauer menyatakan bahwa konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik teritorial yang berakar kuat dalam pencarian identitas nasional dan pengakuan internasional bagi masing-masing negara (Phillippe-Blumauer, 2016). Meskipun diaspora merupakan bagian dari *imagined transnational community* (Chernobrov & Wilmers, 2019: 2) dengan identitas dan aktivitas yang tidak dibatasi oleh teritori negara yang kaku, namun perwujudan dari nasionalisme mereka masih merujuk pada suatu tanah air/teritori tertentu. Dalam pembahasan di bagian selanjutnya, studi kasus diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh akan menunjukkan bagaimana manifestasi nasionalisme diaspora mempengaruhi dua negara yang sedang terlibat konflik sehingga sangat relevan untuk dibahas dalam kajian ilmu Hubungan Internasional.

Tulisan ini berupaya untuk melihat bagaimana ide nasionalisme yang dimiliki diaspora terwujud dalam peranan mereka dalam konflik di tanah air. Penulis menyadari bahwa meski bukan hal yang baru, kajian mengenai potensi dan peranan diaspora dalam konflik di tanah air masih sedikit. Maka dari itu, tulisan ini dapat menghadirkan perspektif nonutilitarianisme dengan memberikan penekanan pada potensi peranan diaspora dalam keberlangsungan konflik di tanah air, baik sebagai agen eskalasi atau resolusi konflik. Lebih lanjut, tulisan ini dibuat sebagai upaya peningkatan perhatian pada diaspora sebagai aktor nonnegara dan unit analisis yang penting dalam ilmu Hubungan Internasional.

Konsep Diaspora

Masing-masing fenomena diaspora itu unik sehingga sulit untuk menentukan generalisasi pola manifestasi dari nasionalisme diaspora. Respons diaspora terhadap isu nasionalisme berbeda-beda di tiap komunitas diaspora. Demikian pula dalam mempengaruhi negara asal yang merupakan objek nasionalisme diaspora, diaspora memiliki pengaruh dan kapasitas yang berbeda-beda. Shain dan Barth menyoroti bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengaruh diaspora di negara asal yang meliputi situasi di negara tuan rumah dan tanah air, tingkat motivasi dan kepentingan diaspora, dan keeratatan hubungan (keseimbangan kekuasaan) antara diaspora dan tanah air (Shain & Barth, 2003). Ketiga faktor diatas akan digunakan untuk menganalisis manifestasi nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Aspek pertama adalah situasi di negara tuan rumah dan di negara asal. Sifat dasar rezim di negara tuan rumah menentukan kemampuan diaspora untuk mengatur pengaruh. Secara umum, dalam rezim nondemokratis, organisasi masyarakat sipil relatif sulit melakukan aktivitas atau bahkan dilarang. Hal ini sehubungan dengan diaspora yang dianggap memiliki efek erosi bagi persatuan nasional (Shain & Barth, 2003). Seperti halnya di negara tuan rumah, tanah air yang dapat ditembus secara demokratis cenderung rentan terhadap pengaruh diasporik. Selain itu, kondisi negara yang miskin sumber daya ideologis, material, dan institusional (baik demokratis maupun tidak) umumnya diaspora memiliki pengaruh yang lebih besar (Shain & Barth, 2003).

Aspek kedua adalah motivasi dan kepentingan diaspora. Diaspora memiliki lintas waktu, masalah, dan motivasi yang beragam untuk mempengaruhi tanah air mereka. Siapa yang membangun identitas kolektif, dan untuk apa, sangat menentukan isi simbolis dari identitas ini, dan maknanya bagi mereka yang mengidentifikasi identitas tersebut sebagai bagian dari dirinya (Castells, 2010). Suara siapa yang didengarkan kemudian akan menentukan apa motivasi atau tujuan dari tindakan nasionalisme yang akan dilakukan, untuk membentuk tanah air baru, merebut kedaulatan, menyelamatkan identitas, atau sekadar membantu keluarga dan kerabat di tanah air. Selain motivasi, dalam setiap komunitas diaspora mungkin ada perbedaan yang signifikan antarkelompok terkait kepentingan mereka. Diaspora mungkin dimotivasi kepentingan masyarakat di tanah air, tanah air, komunitas atau organisasinya (Shain & Barth, 2003). Shain mengidentifikasi ada empat kepentingan yang mempengaruhi sikap atau postur diaspora terhadap peristiwa di tanah air yaitu: 1) kepentingan untuk mempertahankan identitas etnis mereka; 2) persaingan dengan tanah air untuk kepemimpinan komunitas transnasional; 3) kepentingan organisasi atau birokrasi yang berasal dari organisasi diaspora; dan 4) kepentingan dan tujuan politik diaspora lainnya di negara tuan rumah (Shain, 2002).

Aspek ketiga adalah kadar keeratan hubungan diaspora dengan negara asal. Terkait dengan pengaruh diaspora di tanah air, hubungan yang kuat diartikan sebagai sejauh mana tanah air membutuhkan sumber daya diaspora. Kebutuhan ini sebagian besar diukur melalui sumber daya keuangan yang dapat diinvestasikan diaspora di tanah air mereka atau melalui dukungan politik yang dapat mereka mobilisasi di negara asal mereka. Dengan demikian jika tanah air membutuhkan dukungan diaspora dan ada kesatuan suara dalam komunitas diaspora maka kemampuan diaspora untuk mempengaruhi tanah air semakin besar (Shain & Barth, 2003).

Menurut Shain & Barth (Shain & Barth, 2003), aspek-aspek diatas dapat mempengaruhi keefektifan pengaruh diaspora di tanah air dengan beberapa asumsi. Pertama, apabila negara tuan rumah dan tanah air memiliki rezim yang demokratis, peluang diaspora untuk mempengaruhi tanah air semakin besar. Kedua, semakin 'lemah' tanah air, baik dalam hal kebutuhan akan aset diaspora dan permeabilitas terhadap tekanan masyarakat maka semakin besar pengaruh yang akan diberikan komunitas diaspora di tanah air. Ketiga, jika kekuatan hubungan antara diaspora dan

tanah air cenderung menguntungkan pihak pertama, maka diaspora akan lebih mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri tanah air. Analisis pada bagian berikutnya akan berangkat dari tiga asumsi ini.

Metode Penelitian

Penulis menyadari bahwa setiap diaspora itu unik, tidak semua diaspora dapat dianalisis dengan dengan cara yang sama karena jenis, alasan, sumber solidaritas dan tujuan aktivisme mereka berbeda-beda. Masing-masing komunitas diaspora memiliki tingkat keterikatan atau emosi serta berbagi pemahaman mengenai tanah air yang berbeda. Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis kemudian memutuskan untuk menggunakan metode studi kasus untuk lebih memahami bagaimana wujud dari nasionalisme diaspora dalam konflik di tanah air dengan berfokus pada komparasi aktivisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam menanggapi konflik di Nagorno-Karabakh.

Kompleksitas dan kekhasan fenomena diaspora ini dapat dikaji dengan menggunakan desain penelitian komparasi kasus yang paling tidak mirip (*least-similar case comparisons*) dari Bennet & Elman. Metode ini mengarahkan peneliti untuk memilih kasus dengan variabel terikat yang sama namun memiliki variabel bebas yang berbeda (Bennett & Elman, 2007). Dalam tulisan ini, variabel terikat yang dimaksud adalah pandangan nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan yang sama terkait Nagorno-Karabakh sebagai tanah air yang memiliki makna khusus bagi identitas dan kesadaran nasional kedua pihak. Bagi masing-masing pihak, teritori Nagorno-Karabakh merupakan konstituen penting untuk pembangunan nasional (Minasyan, 2016), representasi dan mobilisasi diaspora di tanah air (Voronkova, 2013). Sementara itu, variabel bebasnya adalah tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan manifestasi nasionalisme diaspora masing-masing diaspora yaitu (1) kondisi di negara asal dan di negara tuan rumah, (2) motivasi dan kepentingan organisasi diaspora, dan (3) keeratan hubungan diaspora dengan negara asal.

Hasil dan Pembahasan

Peran Diaspora sebagai Manifestasi dari Nasionalisme Diaspora

Diaspora, negara asal, dan negara tuan rumah dipertemukan dalam suatu relasi yang menghubungkan satu sama lain yang dinamakan dengan relasi triangular (Safran, 1991). Diaspora menjadi aktor yang dapat menghubungkan negara asal dan negara tuan rumah sehingga kedua entitas negara tersebut juga memiliki ruang untuk mempengaruhi satu dengan yang lain. Terkait dengan relasi triangular tersebut, diaspora memiliki beberapa agenda dan kepentingan salah satunya adalah agenda nasionalisme. Agenda ini kemudian termanifestasi dalam tindakan diaspora atau peranan diaspora di negara asal maupun di negara tuan rumah.

Sebelumnya sudah ada beberapa penulis yang membahas peran diaspora bagi negara asal dan negara tuan rumah. Peran diaspora bagi negara asal diantaranya adalah untuk pembentukan negara (Lie, 2001), pembangunan nasional (Naufanita dkk., 2018), agen demokratisasi (Koinova, 2009), agen resolusi dan pelestarian konflik (Shain, 2002), dan pelobi kebijakan luar negeri di tanah air (Shain & Barth, 2003). Sementara itu, peranan diaspora di negara tuan rumah diantaranya adalah sebagai penghubung negara asal dan negara tuan rumah (Shain & Barth, 2003) (Safran, 1991) dan ekspansi konflik (Naim, 2002) (Shain & Barth, 2003). Tulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai peranan diaspora di negara asal, khususnya dalam situasi konflik di tanah air.

Peningkatan perhatian pada peranan politis komunitas diaspora dalam konflik di tanah air terjadi karena adanya pola konflik baru yang menimbulkan banyak diaspora pengungsi, globalisasi komunikasi, dan sulitnya berasimilasi dengan masyarakat setempat membuat diaspora fokus pada urusan politik di tanah air (Demmers, 2001). Dalam situasi konflik di tanah air, diaspora bisa berperan sebagai agen resolusi dan pelestarian konflik. Sebagai agen pelestarian konflik di tanah air, diaspora dapat menjadi sumber dukungan dana, politik, dan militer untuk kelompok separatis atau pemerintah yang sedang berkonflik. Sementara itu, sebagai agen resolusi konflik, diaspora sebagai utusan tidak resmi pemerintah membangun jaringan diplomasi dan lobi agar negara tuan rumah mendukung pemerintah tanah airnya atau sebaliknya (Shain, 2002). Akan tetapi, tren literatur menunjukkan bahwa kontribusi diaspora dalam konflik tanah air yang lebih sering disoroti adalah terkait peranan mereka dalam

eskalasi konflik, dukungan konstruktif diaspora dalam transformasi konflik relatif jarang disoroti (Bahar Baser & Swain, 2008). Pilihan diaspora untuk menjadi agen pelestarian konflik atau agen resolusi konflik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan yang dimiliki oleh diaspora tersebut.

Nagorno Karabakh: Manifestasi Nasionalisme Diaspora yang Berbeda

Secara historis, konflik Nagorno-Karabakh dapat dilihat sebagai warisan dari kebijakan era Uni Soviet di wilayah Kaukasus Selatan. Pada tahun 1920 pemerintah Uni Soviet mengembangkan kebijakan pengorganisasian wilayah berbasis etnis dan saat itu Nagorno-Karabakh dimasukkan dalam otoritas Armenia. Namun tidak lama kemudian, tepatnya tahun 1993, keputusan ini dibatalkan oleh Stalin, yang kemudian memproklamasikan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonomi Azerbaijan (Companjen, 2010). Sejak saat itu hingga September 2020 lalu, isu kepemilikan Nagorno-Karabakh masih menjadi konflik yang berkepanjangan dan kedua negara tampak tidak memiliki niat untuk berkompromi. Armenia dan Azerbaijan (termasuk diaspora masing-masing negara) sama-sama melihat Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari tanah air mereka, Armenia melihatnya sebagai tanah air dengan basis etnis, sementara Azerbaijan melihatnya sebagai tanah air berbasis teritorial atau wilayah administratif.

Dalam mengidentifikasi bentuk manifestasi nasionalisme dari diaspora Armenia dan Azerbaijan terkait konflik Nagorno-Karabakh, penulis menggunakan tipe mobilisasi diaspora dari Koinova. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa konflik Nagorno-Karabakh merupakan situs perebutan kedaulatan tanah air antara diaspora Armenia dan Azerbaijan. Koinova berargumen bahwa diaspora yang memiliki tanah air dengan kedaulatan terbatas dapat menjadi aktor yang radikal (diasosiasikan dengan kekerasan tingkat tinggi) dan moderat (diasosiasikan dengan kekerasan tingkat rendah) tergantung pada dinamika tanah air dan keterlibatan diaspora dengan elit transnasional (Koinova, 2012). Dinamika di tanah air menentukan strategi apa yang dipilih diaspora untuk mencapai kepentingannya di tanah air, kekerasan atau nonkekerasan. Selain itu, keterlibatan diaspora dengan elit transnasional, misalnya dengan organisasi diaspora yang berpengaruh, dapat meningkatkan kapasitas diaspora dalam mencapai kedaulatan bagi tanah airnya.

Sebelum melihat bentuk akhir dari masing-masing nasionalisme diaspora, pembahasan selanjutnya akan berupaya untuk mengidentifikasi tiga aspek yang mempengaruhi manifestasi nasionalisme dari diaspora Armenia dan Azerbaijan terkait konflik Nagorno-Karabakh. Aspek situasi di negara tuang rumah dan negara asal mencakup (1) situasi di Armenia, (2) situasi di Azerbaijan, (3) situasi di negara dengan populasi diaspora Armenia terbesar (Rusia dan AS), (4) situasi di negara dengan populasi diaspora Armenia terbesar (AS). Sementara itu, aspek motivasi dan kepentingan diaspora mencakup (1) motivasi dan kepentingan diaspora Armenia dan (2) motivasi dan kepentingan diaspora Azerbaijan. Aspek kadar keeratn hubungan diaspora dengan negara asal terdiri atas (1) hubungan diaspora Armenia dengan negara asal dan (2) hubungan diaspora Azerbaijan dengan negara asal.

Situasi di Armenia

Armenia merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Kristen mula-mula dan secara demografi juga didominasi oleh etnis Armenia beragama Kristen. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai kemerdekaan Armenia. Pemerintahan Armenia baru kemudian memulai reformasi. Hal ini dimulai dengan menggeser sistem politik-ekonomi negara dari yang dikendalikan secara terpusat dan diktaktor menjadi pasar bebas dan demokrasi (Keshishian & Harutyunyan, 2013: 372). Akan tetapi, dalam kasus Armenia, transisi ini sulit dilakukan karena beberapa faktor yaitu konflik Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan yang merenggut ribuan nyawa dan krisis ekonomi yang berkepanjangan karena sanksi ekonomi dari Turki (Keshishian & Harutyunyan, 2013) serta blokade jalur gas alam oleh Azerbaijan (Howe, 2021). Faktor-faktor ini menjadikan Armenia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terburuk di dunia dan demokratisasi tidak bisa berlangsung secara penuh di negara ini. Dalam kondisi ini, pemerintah Armenia membutuhkan dukungan untuk bertahan dan salah satunya melalui bantuan diaspora.

Situasi di Azerbaijan

Azerbaijan adalah negara dengan dengan penduduk mayoritas Muslim dan perekonomian yang sangat bergantung pada ekstraksi dan ekspor minyak dan gas alam khas Timur Tengah. Kekuatan politik dan ekonomi terkonsentrasi dan diwarisi dalam

keluarga yang berkuasa. Keluarga presiden *Azeri* dan para birokrat teratas yang menjalankan pemerintahan dan monopoli bisnis di setiap industri dan perdagangan (khususnya dalam sektor ekspor minyak). Dalam konstitusi negaranya, Azerbaijan tercatat sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokratis akan tetapi pada praktiknya yang terjadi adalah demokrasi pura-pura atau tiruan. Situasi ini kemudian membuat Azerbaijan rentan terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia dan penggabungan kepentingan politik-bisnis yang mengerikan demi menjamin stabilitas ekspor minyak (Rasizade, 2011). Meskipun sama-sama berada dalam krisis perekonomian, Azerbaijan tidak seperti Armenia yang menekankan pentingnya bantuan diaspora dalam menopang perekonomian negaranya.

Situasi di Rusia dan AS (Negara dengan Populasi Diaspora Armenia Terbesar)

Berdasarkan data statistik, populasi diaspora Armenia terbesar berada di Rusia. Akan tetapi, rezim otoritarian di Rusia tidak mendukung perkembangan aktivisme komunitas diaspora Armenia, terutama sebelum runtuhnya Uni Soviet. Pada masa itu, sekolah dan media massa Armenia ditutup, bahkan kegiatan Gereja Armenia (yang merupakan salah satu institusi terpenting bagi komunitas) dilarang (*Armenian Diaspora Communities: Russia*, 2021). Selain Rusia, negara tuan rumah terbesar dan sangat berpengaruh bagi pergerakan diaspora Armenia adalah Amerika Serikat (*Armenian Diaspora Communities: United States of America*, 2021). Iklim yang demokratis di Amerika Serikat telah membuat aktivitas diaspora Armenia dapat dilangsungkan dengan ruang yang leluasa. Sejumlah organisasi Armenia didirikan di Amerika Serikat, termasuk *Armenian Union* (organisasi Armenia pertama di Amerika Serikat) dan *Armenian Revolutionary Federation* (ARF) yang merupakan organisasi diaspora Armenia paling berpengaruh saat ini.

Situasi di Amerika Serikat (Negara dengan Populasi Diaspora Azerbaijan Terbesar)

Saat ini, populasi diaspora Azerbaijan terbesar ada di Amerika Serikat. Mayoritas orang Azerbaijan di Amerika Serikat bekerja di sektor perbankan, pabrik dan perdagangan. Sangat sedikit populasi diaspora Azerbaijan yang menempati ruang politik seperti di pemerintahan dan universitas. Meskipun rezim demokratis Amerika Serikat telah menyediakan iklim yang kondusif bagi komunitas diaspora Azerbaijan

untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan agendanya, namun asosiasi-asosiasi diaspora Azerbaijan yang ada di AS masih terfragmentasi dan hanya berfungsi secara simbolis saja. Alhasil, organisasi diaspora Azerbaijan tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti organisasi diaspora Armenia di AS (Uslu & Kocaman, 2013).

Motivasi dan Kepentingan Diaspora Armenia

Armenian Revolutionary Federation (ARF) atau Partai Dashnak adalah organisasi transnasional pan-Armenia yang mengklaim dirinya sebagai penjaga nasionalisme Armenia (Shain, 2002: 122). Partai Dashnak memiliki misi untuk menunjukkan pada dunia bahwa wilayah Armenia akan direbut kembali suatu hari nanti, dan bahwa diaspora masih memiliki salah satu karakteristik pemerintahan, yaitu angkatan bersenjata, betapapun kecilnya (Shain & Barth, 2003: 467). Bagi Partai Dashnak, makna ‘tanah air’ disinonimkan dengan visi negara Armenia yang merdeka dan independen (Schwalgin, 2004: 80). Dalam konteks Nagorno-Karabakh, hal ini berarti klaim penuh atas wilayah tersebut. Aktivisme nasionalisme diaspora Armenia melalui Partai Dashnak menekankan retensi identitas pada memori di dalam diaspora, khususnya memori tentang genosida (Shain & Barth, 2003: 468). Dalam kasus Nagorno-Karabakh, genosida dan anti-Turki menjadi motivasi atau penggerak kesadaran nasionalisme diaspora Armenia untuk mengakuisisi wilayah tersebut (Ismailzade, 2011: 7). Selain motivasi dan kepentingan, satu hal yang penting dari Partai Dashnak adalah bahwa anggotanya terdiri dari diaspora-diaspora yang sudah mapan dan mampu memberikan kontribusi ekonomi, politik, dan militer secara langsung pada tanah air (Østergaard-Nielsen, 2001: 228).

Motivasi dan Kepentingan Diaspora Azerbaijan

Komunitas diaspora Azerbaijan mengorganisasi berbagai asosiasi acara yang bertujuan untuk menginformasikan tentang agresi di Azerbaijan oleh Armenia kepada anggota komunitas lainnya. Kapasitas diaspora Azerbaijan dalam hal ini tidak sebesar kapasitas diaspora Armenia. Solidaritas budaya dan politik nasional dari orang-orang Azerbaijan juga tidak spesifik seperti diaspora Armenia. Dalam hal kesadaran nasional, komunitas diaspora Azerbaijan tidak memiliki kesamaan suara dan tidak berupaya untuk kepentingan nasional bersama. Mayoritas diaspora Azerbaijan

menunjukkan sedikit minat dalam ketidakstabilan, separatisme atau reunifikasi dengan Azerbaijan yang diilhami oleh (nasionalisme) etnis (Grebennikov, 2013: 76). Pada isu Nagorno-Karabakh, kepentingan dan motivasi diaspora Azerbaijan masih kompatibel dengan kepentingan negaranya yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan atas teritorial mereka. Akan tetapi, berbeda dengan diaspora Armenia, diaspora Azerbaijan kurang efektif dan lemah dalam melakukan advokasi, penggalangan dana, dan lobi terhadap pemerintah.

Hubungan Diaspora Armenia dengan Negara Asal

Keseimbangan kekuasaan antara diaspora Armenia dan tanah air menunjukkan bahwa diaspora memiliki posisi yang kuat dalam dinamika relasi kuasa dengan tanah airnya. Setelah kemerdekaan, ekonomi Armenia mengalami resesi dan menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Situasi ini kemudian membuat pemerintah Armenia tidak punya banyak pilihan dan akhirnya meningkatkan ketergantungan pada remitansi dari diaspora Armenia. Alhasil, permeabilitasnya terhadap pengaruh diaspora semakin besar dan dengan demikian mengubah keseimbangan kekuasaan antara keduanya (Shain & Barth, 2003: 470-471). Berbeda dengan negara Armenia, diaspora Armenia kuat dan terorganisasi dengan baik (Shain & Barth, 2003: 471), bahkan diaspora Armenia juga tergolong sebagai diaspora paling efektif di kalangan komunitas diaspora lainnya (Uslu & Kocaman, 2013: 49). Selain kontribusi finansial, diaspora Armenia memiliki jaringan lobi yang kuat di negara tuan rumah untuk mengamankan simpati diplomatik terhadap tanah air (khususnya di AS) dan diaspora juga dapat memberikan tekanan signifikan pada pemerintah Armenia dan bentuk opini publik.

Hubungan Diaspora Azerbaijan dengan Negara Asal

Setelah memperoleh kemerdekaan, salah satu tugas utama yang dihadapi pemerintah Azerbaijan adalah mengatur orang-orang Azerbaijan yang tinggal di luar negeri. Kemudian, pada tahun 1993 pemerintah Azerbaijan mulai menjalin hubungan dengan diaspora Azerbaijan dan mendorong mereka untuk mengambil bagian aktif dalam proses mewujudkan kepentingan nasional. Pemerintah Azerbaijan menyadari bahwa diaspora memiliki potensi untuk membantu pencapaian kepentingan nasional (*About the Committee: History and Purpose of Creation*, 2021). Dalam dinamika hubungan

antara Azerbaijan dengan diasporanya, negara menempati posisi yang lebih kuat dibandingkan diaspora. Sejalan dengan penjelasan aspek motivasi dan kepentingan diaspora Azerbaijan sebelumnya, diaspora Azerbaijan tidak memiliki kapabilitas yang signifikan (dibandingkan dengan diaspora Armenia) dalam mempengaruhi pemerintah tanah air. Terkait konflik Nagorno-Karabakh pun, peranan diaspora Azerbaijan tidak terlalu besar dalam mempengaruhi postur negaranya atas isu tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek yang dapat mempengaruhi manifestasi nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan, penulis kemudian membuat Tabel 1 di bawah. Meskipun persepsi masing-masing diaspora terhadap Nagorno-Karabakh sebagai tanah air sama namun manifestasi dari kesadaran nasionalisme mereka berbeda. Penulis menyoroti bahwa persepsi nasionalisme dan kapabilitas diaspora merupakan pembeda utama dalam tindakan diaspora. Ide nasionalisme yang kuat dan kapabilitas yang memadai telah membuat diaspora Armenia mampu mempengaruhi tanah airnya dan melakukan lebih dari sekadar menggalang dana dan bantuan humaniter untuk konflik Nagorno-Karabakh. Sementara itu, diaspora Azerbaijan hanya beraktivitas di seputar pengorganisasian demonstrasi dan pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk tentara yang terluka dan keluarganya (B. Baser & Féron, 2020).

Tabel 1. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Manifestasi Nasionalisme Diaspora Armenia dan Azerbaijan Terhadap Kasus Nagorno-Karabakh

No.	Aspek	Armenia	Azerbaijan
1.	Situasi di negara asal	Rezim: demokrasi tidak utuh Situasi ekonomi: pasar bebas, krisis	Rezim: demokratis (tiruan), Situasi ekonomi: despotisme, krisis
	Situasi di negara tuan rumah (negara dengan mayoritas populasi diaspora)	Rezim: otoritarian (Rusia), demokratis (AS)	Rezim: demokratis (AS)
2.	Motivasi dan kepentingan diaspora	Didominasi oleh Partai Dashnak yang tujuannya adalah merebut kembali tanah air, diaspora mapan	Diaspora tidak memiliki basis nasionalisme yang spesifik dan kemampuannya juga tidak signifikan
3.	Hubungan diaspora dengan negara asal	Pengaruh diaspora lebih kuat, dependensi Armenia	Negara lebih kuat, peran diaspora tidak terlalu signifikan

	pada sokongan finansial diaspora	
Manifestasi Nasionalisme	Radikal Kuat	Moderat Lemah
Diaspora		

Sumber: hasil olahan penulis.

Eskalasi konflik pada September 2020 tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Pada November 2020, Armenia dan Azerbaijan sepakat menandatangani perjanjian gencatan senjata dan mengakhiri konfrontasi militer antara kedua pihak. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Azerbaijan akan mempertahankan wilayah Nagorno-Karabakh yang telah diambil selama konflik dan Armenia akan menarik diri dari beberapa daerah lain yang berdekatan dengan wilayah konflik. Azerbaijan melihat kesepakatan ini sebagai satu langkah kemenangan atas Nagorno-Karabakh namun Armenia tampaknya tidak merasa kalah karena perjuangannya belum berhenti sepenuhnya (“Armenia, Azerbaijan and Russia Sign Nagorno-Karabakh Peace Deal,” 2020). Singkatnya konflik ini kembali pada status awal sebelum eskalasi di September 2020, meskipun ada perjanjian yang mengikat namun masyarakat (termasuk diaspora) masing-masing menolak untuk tunduk secara penuh pada kesepakatan dan tetap melanjutkan agenda masing-masing di Nagorno-Karabakh. Situasi ini sebelumnya sudah pernah diprediksi oleh Minasyan (2016) dengan menyebutnya sebagai konflik beku. Negosiasi yang membutuhkan sumber daya politik yang besar dengan peluang keberhasilan yang tipis membuat pihak-pihak terlibat enggan untuk menjalankannya (Minasyan, 2016: 3). Kondisi *status quo* ini dinilai oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan politik mereka, maka kemungkinan besar konflik ini masih akan melalui siklus eskalasi-negosiasi di masa yang akan datang karena konflik ini belum benar-benar selesai.

Simpulan

Peningkatan minat terhadap potensi diaspora turut mendorong pengkajian ulang terhadap konsep nasionalisme klasik yang cenderung memusatkan negara sebagai satu-satunya unit analisis. Paradigma nasionalisme klasik tidak cukup relevan untuk menjelaskan nasionalisme yang dimiliki oleh aktor transnasional seperti diaspora, maka dari itu, nasionalisme diaspora dibentuk untuk menjembatani kekosongan ini. Kajian mengenai nasionalisme diaspora sangat beragam dan pada dasarnya sangat sulit

untuk dihomogenisasi karena ada karakteristik, pengalaman, dan kekhasan yang unik dari masing-masing komunitas diaspora. Keberagaman dan kekhasan ini juga ditunjukkan dalam manifestasi nasionalisme diaspora yang berbeda bagi masing-masing kelompok diaspora.

Komparasi manifestasi nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada beberapa faktor baik dari negara asal, negara tuan rumah maupun internal diaspora itu sendiri yang memengaruhi aktivisme mereka terkait konflik perebutan teritori Nagorno-Karabakh. Akhir kata, selama pembuatan tulisan ini penulis menyadari bahwa nasionalisme sebagai basis solidaritas dan identitas bersama tidak selalu cukup untuk menjelaskan dinamika aktivitas diaspora yang terjadi antara diaspora dengan tanah air, diaspora dengan negara tuan rumah, dan antarkomunitas diaspora. Maka dari itu, penulis kemudian merekomendasikan agar penelitian selanjutnya memperdalam kajian mengenai potensi lain dari diaspora dengan mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman kelompok marjinal seperti feminisme dan poskolonialisme.

Referensi

- About the Committee: History and Purpose of Creation*. (2021). State Committee on Work with Diaspora of The Republic of Azerbaijan. <http://diaspor.gov.az/en/tarix/>
- Anderson, B. (1983). Introduction. In *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (pp. 1–9). Verso Publication.
- Anderson, B. (1992). Long-Distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics. In *Centre for Asian Studies Amsterdam*.
- Armenia, Azerbaijan and Russia Sign Nagorno-Karabakh Peace Deal. (2020, November 10). *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564>
- Armenian Diaspora Communities: Russia*. (2021). The Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs. <http://diaspora.gov.am/en/pages/15/russia>
- Armenian Diaspora Communities: United States of America*. (2021). The Office of The High Commissioner for Diaspora Affairs. <http://diaspora.gov.am/en/pages/3/usa>
- Baser, B., & Féron, É. (2020, November 13). Nagorno-Karabakh, Diaspora Communities, and How Tensions Boiled Over on Far Away City Streets. *The Conversation*. <https://theconversation.com/nagorno-karabakh-diaspora-communities-and-how-tensions-boiled-over-on-far-away-city-streets-149930>
- Baser, Bahar, & Swain, A. (2008). Diasporas as Peacemakers: Third Party Mediation in Homeland Conflicts. *International Journal on World Peace*, 25(3), 7–28.
- Bennett, A., & Elman, C. (2007). Case Study Methods in the International Relations Subfield. *Comparative Political Studies*, 40, 170–195. <https://doi.org/10.1177/0010414006296346>

- Brubaker, R. (2005). The “Diaspora” Diaspora. *Ethnic and Racial Studies*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/0141987042000289997>
- Castells, M. (2010). Communal Heavens: Identity and Meaning in the Network Society. In *The Power of Identity* (pp. 5–70). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781444318234.ch1>
- Chernobrov, D., & Wilmers, L. (2019). Diaspora Identity and a New Generation: Armenian Diaspora Youth on the Genocide and the Karabakh War. *Nationalities Papers*, 1–16. <https://doi.org/10.1017/nps.2019.74>
- Clifford, J. (1994). Diasporas. *Cultural Anthropology*, 9(3), 302–338. <https://doi.org/10.1525/can.1994.9.3.02a00040>
- Companjen, F. J. (2010). Nagorno-Karabakh. *Atlantisch Perspectief*, 34(4), 9–14.
- Demmers, J. (2001). Diaspora and Conflict: Locality, Long-Distance Nationalism, and Delocalisation of Conflict Dynamics. *Javnost-The Public*, 9(1), 85–96.
- Grebennikov, M. (2013). The Puzzle of a Loyal Minority: Why Do Azeris Support the Iranian State? *The Middle East Journal*, 67(1), 64–76.
- Gusnelly, G. (2017). Diaspora dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia di Belanda. *Jurnal Kajian Wilayah*, 33–44. <https://doi.org/10.14203/jkw.v8i1.760>
- Halliday, F. (2001). Nationalism. In J. Baylis & S. Smith (Ed.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (pp. 440–455). Oxford University Press.
- Helmreich, S. (1992). Kinship, Nation, and Paul Gilroy’s Concept of Diaspora. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 2(2), 243–249. <https://doi.org/10.3138/diaspora.2.2.243>
- Howe, G. M. (2021). Armenia. In *Encyclopedia Britannica*.
- Ismailzade, F. (2011). *The Nagorno-Karabakh Conflict: Current Trends and Future Scenarios*. Istituto Affari Internazionali (IAI).
- Keshishian, F., & Harutyunyan, L. (2013). Culture and Post-Soviet Transitions: A Pilot Study in the Republic of Armenia. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 26(4), 369–392. <https://doi.org/10.1007/s10767-013-9162-7>
- Koinova, M. (2009). Conditions and Timing of Moderate and Radical Diaspora Mobilization: Evidence from Conflict-Generated Diasporas. In *Global Migration and Transnational Politics*.
- Koinova, M. (2012). Four Types of Diaspora Mobilization: Albanian Diaspora Activism for Kosovo Independence in the US and the UK. *Foreign Policy Analysis*, 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2012.00194.x>
- Koinova, M., & Tsourapas, G. (2018). How Do Countries of Origin Engage Migrants and Diasporas? Multiple Actors and Comparative Perspectives. *International Political Science Review*, 39(3), 311–321. <https://doi.org/10.1177/0192512118755843>
- Kramer, A. E. (2020). Armenia and Azerbaijan: What Sparked War and Will Peace Prevail? *The New York Times*.
- Kurien, P. (2017). Majority Versus Minority Religious Status and Diasporic Nationalism: Indian American Advocacy Organisations. *Nations and Nationalism*, 23(2), 109–128. <https://doi.org/10.1111/nana.12255>
- Lie, J. (2001). Diasporic Nationalism. *Cultural Studies: Critical Methodologies*, 1(3), 355–362.
- Minasyan, S. (2016). The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context of South

- Caucasus Regional Security Issues: An Armenian Perspective. *Nationalities Papers*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1237938>
- Missbach, A. (2013). The Waxing and Waning of the Acehnese Diaspora's Long-distance Politics. *Modern Asian Studies*, 47(3), 1055–1082. <https://doi.org/10.1017/S0026749X12000571>
- Naim, M. (2002). Missing Links: The New Diaspora. *Foreign Policy*, 131, 95–96. <https://doi.org/10.2307/3183431>
- Naufanita, H., Yudono, R. M., & Soetjipto, A. (2018). Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), 90–108.
- Østergaard-Nielsen, E. (2001). Diasporas in World Politics. In D. Josselin & W. Wallace (Ed.), *Non-state Actors in World Politics* (pp. 218–234). Palgrave Macmillan.
- Philippe-Blumauer, C. (2016). Nagorno-Karabakh: A Conflict Entrenched in Nationalistic Propaganda. *Foreign Policy Research Institute*.
- Raghuram, P. (2009). Which Migration, What Development? Unsettling the Edifice of Migration and Development. *Population, Space and Place*, 15(2), 103–117. <https://doi.org/10.1002/psp.536>
- Rasizade, A. (2011). Azerbaijan's Prospects in Nagorno-Karabakh with the End of Oil Boom. *Iran and the Caucasus*, 15(1/2), 299–317. <https://doi.org/10.1163/157338411X12870596615755>
- Safran, W. (1991). Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83–99. <https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004>
- Schwalgin, S. (2004). Why Locality Matters: Diaspora Consciousness and Sedentariness in the Armenian Diaspora in Greece. In C. Alfonso, W. Kokot, & K. Tölölyan (Ed.), *Diaspora Identity and Religion: New Directions in Theory and Research* (pp. 72–92). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203401057>
- Shain, Y. (2002). The Role of Diasporas in Conflict Perpetuation or Resolution. *SAIS Review*, 22(2), 115–144. <https://doi.org/10.1353/sais.2002.0052>
- Shain, Y., & Barth, A. (2003). Diasporas and International Relations Theory. *International Organization*, 57(3), 449–479. <https://doi.org/10.1017/s0020818303573015>
- Sinatti, G., & Horst, C. (2015). Migrants as Agents of Development: Diaspora Engagement Discourse and Practice in Europe. *Ethnicities*, 15(1), 134–152. <https://doi.org/10.1177/1468796814530120>
- Smith, A. D. (1991). Nationalism and Cultural Identity. In A. D. Smith (Ed.), *National Identity* (pp. 71–98). Penguin Books.
- Sulistiyono, S. T. (2011). Diaspora and Formation Process of Indonesianess: Introduction to Discussion. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 12(1), 209–228. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12127>
- Tölölyan, K. (1996). Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 15(1), 3–36. <https://doi.org/10.1353/dsp.1996.0000>
- Uslu, R., & Kocaman, S. (2013). The Activities of the Azerbaijani Diaspora in the United States of America. *The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings*, 46–50.
- Voronkova, A. (2013). Nationalism and Organized Violence in Nagorno-Karabakh: A

Microspatial Perspective. *Nationalism and Ethnic Politics*, 19(2), 102–118.
<https://doi.org/10.1080/13537113.2013.761898>